



**JURNAL ISIP VOICE**

**Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Available online at <https://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/fisipvoice>

Vol. 4 No. 2, July-December 2025, pages: 33-40

ISSN: 2963-1874

<https://doi.org/10.58222/gsq1ng21>

## Implementation Of Workforce Placement Policy In The Field Of Placement And Expansion Of Job Opportunities Of The Manpower And Transmigration Service Of Bengkulu Province

### Implementasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Pada Bidang Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu



Irvan Lufti Maulana <sup>a</sup>  
Bobby Mandala Putra <sup>b</sup>  
Henny Aprianti <sup>c</sup>

#### Article history:

Submitted: 27-09-2025

Revised: 29-11-2025

Accepted: 27-12-2025

#### Keywords:

Policy implementation; labor placement; employment policy; Bengkulu Province Manpower and Transmigration Office

#### Abstract

*Unemployment remains a significant challenge in labor development in Bengkulu Province, highlighting the need for effective labor placement policies to improve employment opportunities. This study aims to analyze the implementation of the Minister of Manpower Regulation Number 39 of 2016 concerning Labor Placement at the Placement and Job Expansion Division of the Bengkulu Province Manpower and Transmigration Office and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving key informants, including government officials, implementing staff, company representatives, and job seekers. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model supported by NVivo 12 software. The findings indicate that the implementation of the labor placement policy has generally been effective based on George Edward III's policy implementation dimensions, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Communication among implementers and stakeholders was conducted effectively through various information channels and employment programs. The availability of resources, authority, information, and facilities supported policy implementation; however, challenges remained in terms of limited human resources and the mismatch between job seekers' competencies and labor market demands. Supporting factors included collaboration with companies, training institutions, and the utilization of information technology, while inhibiting factors consisted of limited human resources, competency gaps*

<sup>a</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

<sup>b</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

<sup>c</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu



*among job seekers, and the uneven dissemination of employment information across several regions. Therefore, strengthening coordination, enhancing workforce competencies, and expanding access to employment information are necessary to improve the effectiveness of labor placement policy implementation.*

***Keywords: Policy implementation; labor placement; employment policy; Bengkulu Province Manpower and Transmigration Office***

### **Abstrak**

Permasalahan pengangguran masih menjadi tantangan dalam pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu sehingga diperlukan implementasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja pada Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari pejabat, pegawai pelaksana, perusahaan mitra, dan pencari kerja. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman dengan bantuan aplikasi NVivo 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja telah berjalan cukup baik berdasarkan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menurut teori George Edward III. Komunikasi antar pelaksana dan mitra kerja berlangsung efektif melalui berbagai media informasi dan kegiatan ketenagakerjaan. Ketersediaan sumber daya, kewenangan, informasi, dan fasilitas mendukung pelaksanaan program, meskipun masih terdapat keterbatasan jumlah staf dan kompetensi pencari kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Faktor pendukung implementasi meliputi kerja sama dengan perusahaan, lembaga pelatihan kerja, dan pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja, serta belum optimalnya penyebaran informasi di beberapa wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas tenaga kerja, dan perluasan akses informasi ketenagakerjaan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penempatan tenaga kerja.

***Kata kunci : implementasi kebijakan; penempatan tenaga kerja; ketenagakerjaan; Disnakertrans Provinsi Bengkulu.***

*JURNAL ISIP VOICE Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ©2025.*

*This is an open access article under the CC BY-NC-SA license*

*(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).*

### ***Corresponding author:***

***Irvan Lufti Maulana\****

***Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu***

***Email address: [irvanluftimaulana8@gmail.com](mailto:irvanluftimaulana8@gmail.com)***

## 1. Pendahuluan

Permasalahan ketenagakerjaan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan karena berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tingkat pengangguran yang masih fluktuatif menunjukkan bahwa penyediaan lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya berjalan optimal. Di Provinsi Bengkulu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 3,65% pada tahun 2021 menjadi 3,11% pada tahun 2024, namun kembali meningkat menjadi 3,37% pada tahun 2025. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya pemerintah dalam mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja yang efektif.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja sebagai landasan pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja melalui penyediaan informasi pasar kerja, pelayanan antar kerja, dan fasilitasi hubungan antara pencari kerja dan pemberi kerja. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam mengelola komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan program (Edward III dalam Subarsono, 2011).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketenagakerjaan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Syariyah (2020) menemukan bahwa pelaksanaan bursa kerja mampu mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, namun terkendala pada aspek penyebaran informasi dan keterlibatan perusahaan. Richi (2022) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ketenagakerjaan dipengaruhi oleh koordinasi, sumber daya manusia, dan dukungan organisasi pelaksana. Penelitian Anta (2022) menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Sementara itu, Permata (2025) menemukan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila didukung oleh komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana yang positif, dan struktur birokrasi yang jelas.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi kebijakan publik dan kebijakan ketenagakerjaan, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja pada Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu menggunakan perspektif George Edward III. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada program bursa kerja, pelayanan berbasis elektronik, maupun kebijakan ketenagakerjaan pada daerah lain. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja di Provinsi Bengkulu dengan mengidentifikasi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta faktor pendukung dan penghambat implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja pada Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja berdasarkan model implementasi kebijakan George Edward III dan mengidentifikasi faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

## 2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja pada Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Penelitian dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu pada bulan April 2026.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja. Informan terdiri atas satu informan kunci yaitu Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, empat informan utama yang merupakan pegawai

dan pelaksana program, serta tiga informan pendukung yang terdiri atas perwakilan perusahaan dan pencari kerja. Dengan demikian, jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini sebanyak delapan orang.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan berdasarkan model implementasi George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa laporan, arsip, serta dokumen kebijakan yang relevan.

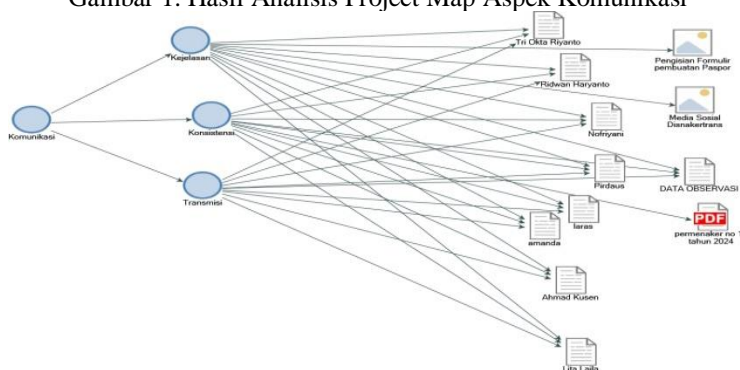
Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, member checking dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dengan informasi yang diberikan oleh informan.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis didukung oleh perangkat lunak NVivo 12 untuk membantu pengkodean data, mengelompokkan tema-tema penelitian, serta memvisualisasikan hubungan antarindikator implementasi kebijakan. Analisis difokuskan pada empat variabel implementasi kebijakan menurut George Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dilaksanakan melalui sosialisasi program, pelayanan informasi ketenagakerjaan, koordinasi internal, serta pemanfaatan media digital. Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi NVivo 12, indikator transmisi memiliki tingkat kemunculan yang lebih dominan dibandingkan indikator kejelasan dan konsistensi komunikasi.

Gambar 1. Hasil Analisis Project Map Aspek Komunikasi

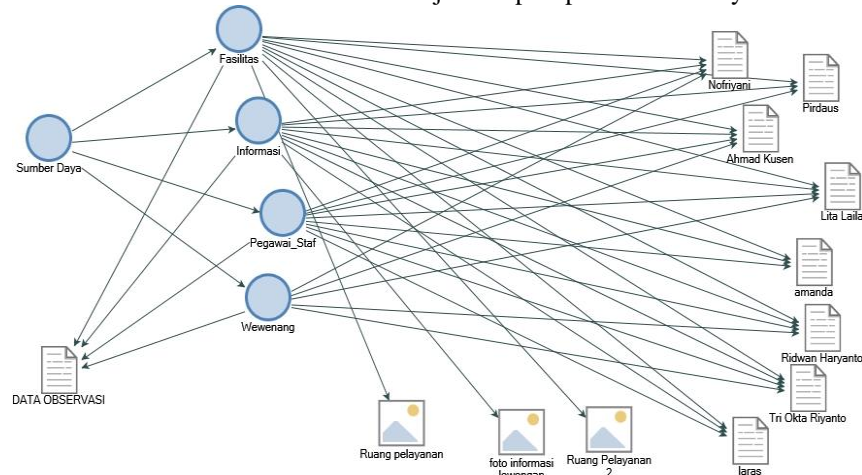


Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa komunikasi menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kegiatan sosialisasi yang dilakukan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menyampaikan informasi secara tepat, jelas, dan mudah dipahami oleh pencari kerja. Secara ilmiah, kondisi tersebut terjadi karena komunikasi yang efektif mampu mengurangi ketidakpastian informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur penempatan tenaga kerja. Semakin jelas informasi yang diterima, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan ketenagakerjaan. Temuan ini mendukung teori implementasi kebijakan George Edward III yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jamal, Mustanir, dan Latif (2020) yang menemukan bahwa komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dan pelayanan publik. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa

masih terdapat kendala penyebaran informasi pada wilayah yang memiliki akses informasi terbatas sehingga menyebabkan sebagian pencari kerja belum memperoleh informasi secara optimal.

Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu meliputi sumber daya manusia, fasilitas pelayanan, informasi, dan kewenangan organisasi. Analisis data menunjukkan bahwa fasilitas dan dukungan teknologi informasi menjadi indikator yang paling dominan dalam mendukung implementasi kebijakan.

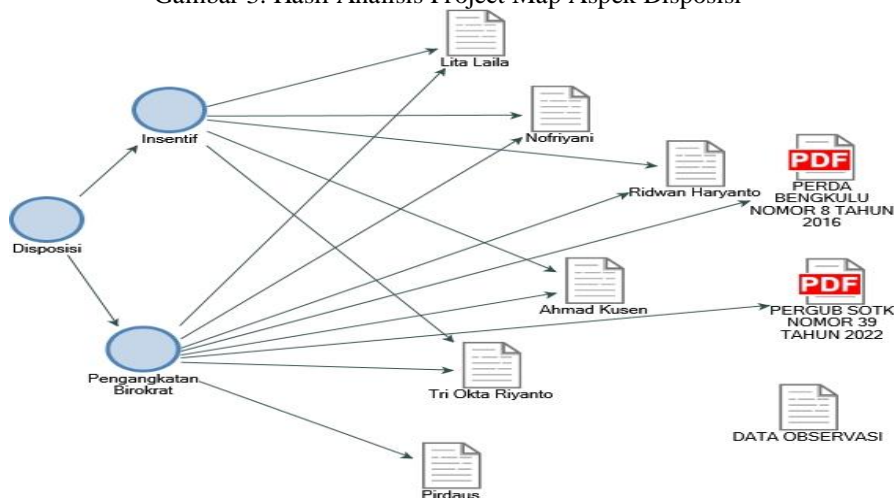
Gambar 2. Hasil Analisis Project Map Aspek Sumber Daya



Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas pelayanan dan teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja. Hal ini terjadi karena proses pelayanan ketenagakerjaan saat ini semakin mengandalkan sistem informasi untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan pengguna tenaga kerja. Secara teoritis, sumber daya yang memadai memungkinkan pelaksana kebijakan menjalankan tugas secara efektif dan efisien. Temuan ini sesuai dengan teori George Edward III yang menempatkan sumber daya sebagai salah satu variabel utama dalam implementasi kebijakan. Penelitian Muliawaty dan Hendryawan (2020) juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan publik. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa jumlah sumber daya manusia pada beberapa bidang masih belum sebanding dengan beban pelayanan yang harus dilaksanakan sehingga berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi pelaksana kebijakan tergolong baik. Aparatur memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam menjalankan tugas serta berupaya memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

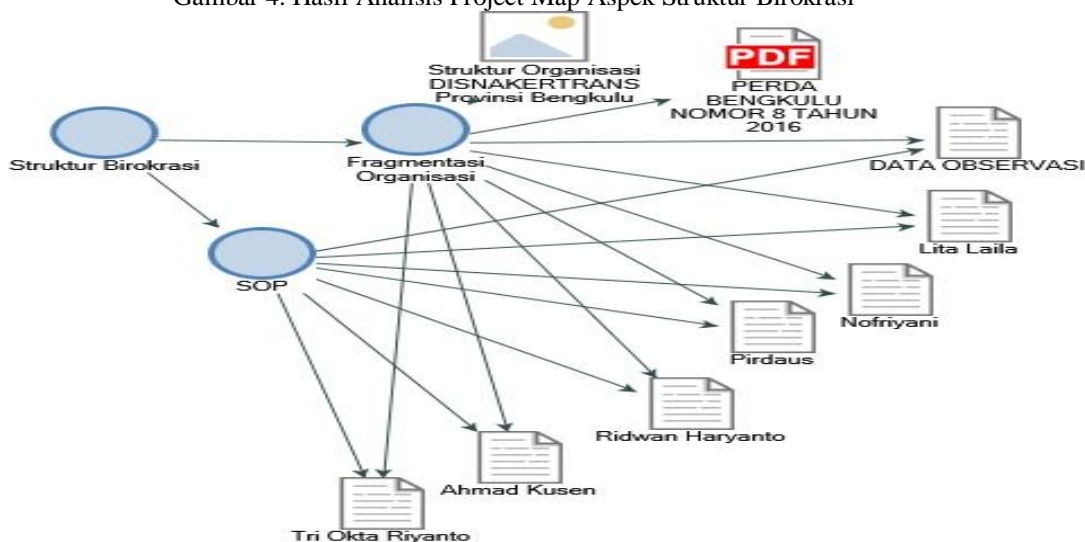
Gambar 3. Hasil Analisis Project Map Aspek Disposisi



Temuan penelitian menunjukkan bahwa sikap positif dan komitmen aparatur berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja. Kondisi tersebut terjadi karena pelaksana kebijakan yang memiliki pemahaman dan komitmen tinggi cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjalankan prosedur pelayanan secara konsisten. Temuan ini mendukung teori Edward III yang menyatakan bahwa disposisi atau sikap pelaksana menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Nugroho (2021) yang menemukan bahwa komitmen pelaksana berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan publik.

Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi telah didukung oleh keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tugas yang jelas antarbidang. Namun demikian, koordinasi antarunit kerja masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan.

Gambar 4. Hasil Analisis Project Map Aspek Struktur Birokrasi



Temuan penelitian menunjukkan bahwa SOP berfungsi sebagai instrumen pengendali yang mampu menciptakan keseragaman pelayanan dan meningkatkan kepastian prosedur dalam penempatan tenaga kerja. Sementara itu, fragmentasi organisasi menyebabkan kebutuhan koordinasi yang lebih intensif antarunit pelaksana. Fenomena tersebut terjadi karena implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja melibatkan berbagai bidang yang memiliki fungsi berbeda. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi birokrasi yang dibangun oleh organisasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Prakoso (2022) yang menyatakan bahwa struktur birokrasi yang jelas dan koordinasi yang baik mampu meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Temuan Ilmiah Penelitian Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh temuan ilmiah bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu ditentukan oleh keterpaduan antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di antara keempat variabel tersebut, komunikasi dan sumber daya merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks pelayanan ketenagakerjaan, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang ada, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menyediakan informasi yang mudah diakses serta dukungan sumber daya yang memadai. Dengan demikian, teori implementasi kebijakan George Edward III terbukti relevan dalam menjelaskan fenomena implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja di Provinsi Bengkulu.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif melalui sosialisasi dan penyampaian informasi yang jelas mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan ketenagakerjaan. Sumber daya, khususnya fasilitas pelayanan dan teknologi informasi, menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kebijakan. Disposisi aparatur yang ditunjukkan melalui komitmen dan tanggung jawab kerja mendukung tercapainya tujuan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi yang didukung oleh SOP membantu menciptakan pelayanan yang lebih terarah dan terstandar.

#### 5. Daftar pustaka

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2022). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anta, I. G. K. C. B. (2022). Implementasi kebijakan publik perspektif George Edward III. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(1), 58–67.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Jamal, Y., Mustanir, A., & Latif, A. (2020). Penerapan good governance dalam pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Clean Government*, 3(2), 45–57.
- Keban, Y. T. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muliawaty, L. (2022). Implementasi kebijakan publik dalam perspektif administrasi publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 19(1), 87–98.
- Nugroho, A. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(2), 120–134.
- Prakoso, A. (2022). Struktur birokrasi dan efektivitas implementasi kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 26(1), 33–47.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahmawati, E., & Yuliana, D. (2020). Implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis elektronik pada pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 145–156.
- Raesalat, M., Muchtar, H., & Ratri, N. (2023). Analisis implementasi kebijakan publik menggunakan model George Edward III. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 12–25.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2021). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Yusuf, M., & Kurniawan, R. (2023). Implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja dalam meningkatkan kesempatan kerja daerah. *Jurnal Ketenagakerjaan Indonesia*, 18(2), 101–115.

